JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246
Vol. 5, No. 6, Januari 2025

Analisis Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Efektifitas Program PKH di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Samkamaria, Maria Lea Frensy Bakarbessy
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, Indonesia
Email: samkamaria.pk25@gmail.com, sakinahmlfb@gmail.com

Article Information
Submitted: *17 February 2025*
Accepted: *21 February 2025*
Online Publish: *21 February 2025*

Abstrak

Upaya pemerintah dalam menurunkan tingginnya angka kemiskinan di indonesia adalah dengan membuat program penanggulangan kemiskinan. Pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa: "sekesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga nergara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu, pada peraturan presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menyatakan bahwa: kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Salah satu program yang diharapkan tepat sasaran adalah program keluarga harapan (PKH). PKH adalam program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga yang rentan miskin (KM) yang tergabung dalam data terpadu dengan data pusat dan ditetapkan dalam keguarga penerima manfaat (Direktorat Jaminan Sosial, 2015). Namun pada implementasinya dilapangan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, disislain ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang bantuannya di putuskan secara sepihak tanpa adanya kejelasan mengenai pemberhentiannya, dan masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH yang datanya bermasalah sehingga tidak padan Capil, Dapodik dan DKTSK. Untuk menganalisis kebijakan program PKH di Kelurahan Besusu Barat Kecamata Palu Timur Kota Palu, penulis menggunakan teori Richart M Street (1985:53) guna melihat pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknis purposive. Dari hasil penelitian program PKH di kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum efektif. Hal tersebut dikarenakan dari aspek pencapaian tujuan dari program PKH belum terimplementasikan dengan baik

Kata kunci: *Kebijakan Publik, Kemiskinan, Efektifitas, Program Keluaraga Harapan (PKH)*

Abstract

The government's efforts to reduce the high poverty rate in Indonesia are by creating a poverty alleviation program. Article 1, paragraph (9) of Law No. 11 of 2009 concerning social welfare states that "social welfare is the condition for the fulfillment of the material, spiritual, and social needs of the citizens of the country in order to be able to live a decent life and be able to develop themselves so that they are able to carry out their social functions. In addition, the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty alleviation states that poverty is an urgent national problem and requires systematic, integrated, and comprehensive handling measures and approaches in order to reduce the burden and fulfill the basic rights of citizens properly through inclusive,

How to Cite: Samkamaria, Maria Lea Frensy Bakarbessy/Analisis Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Efektifitas Program PKH di Kelurahan Besusu Barat Kecamata Palu Timur Kota Palu/Vol 5 No 6 (2025)
DOI: http://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i6.628
e-ISSN: 2721-2246
Published by: Rifa Institute

just, and sustainable development to realize a dignified life. One of the programs that is expected to be on target is the Family Hope Program (PKH). PKH is a program to provide conditional social assistance to families who are vulnerable to poverty (KM) who are included in integrated data with central data and determined in the beneficiary group (Directorate of Social Security, 2015). However, in its implementation in the field, many poor people do not get the assistance, in addition to the beneficiary families (KPM) whose assistance is decided unilaterally without any clarity regarding the dismissal, and there are still beneficiary families (KPM) of the PKH program whose data is problematic so that it does not match Capil, Dapodik, and DKTSK. To analyze the policy of the PKH program in Besusu Barat Village, East Palu District, Palu City, the author uses the theory of Richart M. Street (1985:53) to see the achievement of goals, integrity, and adaptation. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach; the data collection method is carried out through observation, direct interviews, and documentation. The technique of selecting informants uses purposive techniques. From the results of the research, the PKH program in West Besusu Village, East Palu District, Palu City has not been effective. This is because the aspect of achieving the goals of the PKH program has not been implemented properly.

Keywords: *Policy Analysis, Poverty, Effectiveness, Family Hope Program (PKH)*

Pendahuluan

Upaya pemerintah dalam menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan berlakunya program berbasis perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat misikin dan tidak mampu. Program berbasis pemberdayaan masyarakat berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosal menyatakan bahwa: "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga Neragara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsisosialnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2004; Republik Indonesia, 2009).

Dalam UU No.1 Tahun 2018 Tentang program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan /atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ketetapan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Landasan hukum pada program keluarga harapan anatar lain: undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, undang-undang no 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, peraturan presiden no.63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Bantuan Sosial non Tunai dan Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2010, 2011).

Program Keluarga Harapan ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster 1 strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan

pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. (Pratiwi, 2020)

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteaan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun kriteria kompenen penerima bantuan Program Keluarga Harapan : (Kementerian Sosial RI, 2021)

1. Kriteria Komponen Kesehatan:
a. Ibu hamil/menyusui
b. Anak usia dini (0-6 tahun)
2. Kriteria Komponen Pendidikan:
a. SiswaS ekoah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau Sederajat.
b. Siswa Sekoah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat.
c. Anak berusia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial
a. Lanjut usia (Lansia) mulai dari 60 tahun
b. Penyebab disabilitas, terutama disabilitas berat.

Tabel 1. Kategori Penerima Bantuan PKH

No	Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/per 3 Bulan (Rp)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekola SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
6.	Lanjut Usia70+	2.400.000	600.000
7.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

Sumber: kemensos RI, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besaran bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum atau dalam satu anggota keluarga memiliki lebih dari 4 komponen penerima bantuan, maka bantuan yang diberikan adalah hanya 4 komponen yang menerima bantuan. Selain itu ada bantuan tetap untuk setiap keluarga, bantuan ini hanya diberikan pada tahap pertama setiap tahun.

Pembayaran bantuan dilakukan empat kali dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli, dan tahap keempat Oktober. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran pada masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan lembaga

pembayaran.

Dana bantuan ini dibayarkan langsung kepada peserta PKH dengan pendamping PKH pada lembaga pembayar yang diakses dengan kartu debit yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan dana bantuan tersebut dilakukan secara bertahap dikarenakan jumlah peserta PKH di Kelurahan Besusu Barat cukup banyak. Pada saat pencairan pendamping PKH wajib memastikan kesesuaian antara Kartu Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP).

Kelurahan Besusu Barat merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Palu Timur yang memiliki jumlah kepala keluarga 2.060/kk. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu, jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sekitar 446/KPM/KK. Banyak juga ditemukan permasalahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Besusu Barat, seperti tidak konsisten penerima manfaat tunai dan non tunai meskipun sudah memiliki kartu, ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan, kejadian ini memperlihatkan ketidakadilan kepada masyarakat yang sangat memerlukan bantuan tersebut. Masalah utama penyaluran bantuan adalah ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kenyataan, data yang tidak selaras menyebabkan banyak nama di KTP yang berbeda seperti yang terdapat pada kartu Bansos atau nomor NIK. Akibatnya, sistem kementerian tidak dapat mendeteksinya dan ini menyebabkan mereka tidak menerima bantuan dan ada kontribusi sukarela yang dianggap biasa bagi warga sekitar yang dialokasikan terhadap agen kerap kali dicairkan, akibatnya memangkas nominal Bansos yang harus didapat oleh KPM dan juga permasalahan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang dipegang oleh agen e-warung yang mengakibatkan KPM tidak dapat menggunakan kartu tersebut secara mandiri dalam mengambil bansos tunai.

Dalam menganalisis kebijakan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Besusu Barat peneliti menggunakan teori dari (Steers, 1985) dalam bukunya yang berjudul "Efektivitas Organisasi" meliputi:

1. Pencapaian Tujuan, adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu:
    a. Waktu pelaksanaan, dalam hal ini bagaimana jangka waktu yang di butuhkan oleh pendamping PKH dan aparatur Kelurahan bisa menyalurkan Program Keluarga Harapan dengan efektif terhadap warga masyarakat Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan.
    b. Sasaran, dalam hal ini sejauh mana upaya dari dinas sosial sendiri sebagai pemberi penyalur serta pelaksana program bantuan PKH, apakah sudah tercapai dengan baik dan apakah program ini sudah tepat dengan sasaran yang di harapkan dan telah ditentukan sebelumnya melalui kriteria-kriteria yang ditetapkan.
2. Integrasi, pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya integrasi menyangkut proses sosialisasi. Setiap program yang digulirkan oleh pemerintah harus di dukung oleh sosialisasi yang kuat, efektif tidaknya suatu program ditentukan oleh sosialisasi yang merupakan indikator penting Efektivitas Program Keluarga Harapan yang dapat membuat proses pencapaian tujuan berjalan dengan baik. Sosialisasi yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi terhadap masyarakat penerima program keluarga harapan.
3. Adaptasi, adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dimaksudkan bahwa bagaimana sumber daya manusia yang ada pada organisasi

tersebut yang telah diberi wewenang dalam merealisasikan atau melaksanakan program bantuan PKH ini apakah sudah sesuai dengan aturan main yang ada pada pedoman PKH. Serta bagaimana pada saat proses pelaksanaannya pada masyarakat apakah pelaksanaannya sendiri sudah efektif dan bagaimana kesesuaian bantuan yang telah diberikan serta adakah perhatian dari pemerintah setelah bantuan tersebut diberikan.

Efektivitas di tinjau dari pencapaian Keberhasilan Sasaran yaitu masyarakat yang miskin yang memiliki Komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar dalam data DTKS penanganan fakir Miskin. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin, namun pada implementasi dilapangan banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), karena masih ada beberapa masyarakat yang dikategorikan mampu justru mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang anaknya malas sekolah, tidak di bawa posyandu, malas untuk datang pertemuan peningkatan kemampuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bantuannya di putuskan secara sepihak tanpa adanya kejelasan mengenai pemberhentiannya, ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang bermasalah datanya, Sehingga tidak padan Capil, Dapodik dan DTKS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbentuk kata, skema, dan gambar, artinya suatu metode pemecahan masalah yang diteliti secara faktual yang dilengkapi dengan data-data, baik data primer maupun sekunder yang akurat mengenai keadaan objektif penelitian serta penjabaran secara sistematis. Menurut (Satori., 2012)mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah: *Data Collection, Data Condensation, Data Display,* dan *Data Conlusion Drawing*.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu

Berdasakan hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa masalah dilapangan yang ditemukan oleh peneliti terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur. Program Keluarga Harapan (PKH) mulai ada pada tahun 2013 sampai sekarang ini, namun seiringnya berjalan waktu program ini muncul berbagai permasalahan dalam hal pelaksanaan yakni bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sering terlambat dan bahkan tidak cair sama sekali kepada penerima tersebut.

Hal ini di akibatkan menurut Koordinator PKH adalah berkaitan dengan data penerima bantuan tersebut yang sering bermasalah sehingga berdampak pada bantuan mereka itu merupakan permasalahan yang sering terjadi mengenai bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak cair. Kemudian sasaran dari penerima Program Keluarga Harapan yang tidak Efektif, karena tidak sesuai dengan Ketentuan yang di atur dalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 yaitu masyarakat yang Kurang Mampu/Masayarakat Miskin yang terdaftar dalam data penanganan Fakir Miskin.(TNP2K, 2022)

Penerima Bantuan di Kelurahan Besusu Barat kebanyakan masyarakat yang terbilang

mampu dalam hal ekonomi dan juga ada beberapa masyarakat yang sudah tidak memiliki Komponen di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi masih terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini di perkuat oleh fakta empiric yang peneliti amati dilapangan yakni Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tidak melakukan yang namanya Graduasi mandiri yang biasa pendamping lakukan, fenomena berikutnya yakni Berkaitan dengan Kewajiban Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang malas untuk mengikuti kegiatan posyandu dan memeriksakan kandungannya di Fasilitas Kesehatan terdekat.

Untuk mengetahui suatu efektivitas bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu timur Saat ini peneliti menggunakan 3 indikator untuk mengukur efektivitas yang di kemukakan oleh (Steers, 1985)yaitu: Pencapain Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

a. Pencapaian Tujuan

Proses pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatanyang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efesiensi berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Aspek "proses pencapaian tujuan" dalam penelitian bahwa intelektualitas tidak lagi terletak pada pucuk pimpinan, tetapi terletak pada lapisan bawah. Mereka yang dekat dengan sasaran yang ingin dituju dan yang paling mengerti dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Dalam hal ini program ini sepenuhnya akan digerakkan oleh dinamika para pekerja (ujung tombak) sesuai spesialisasi masing- masing dalam hal ini pemerintah dan pendamping PKH. Untuk menjaga kekompakkan agar terjadi irama yang serasi dibutuhkan seorang pemimpin yang berfungsi sebagai konduktor. Pemimpin tersebut tidak lagi harus memiliki pengetahuan teknis seperti yang dimiliki bawahan. Tetapi yang diperlukan hanya seorang yang mampu mengatur dan menguasai jalannya program.

1). Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan, kemampuan implementor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk waktu pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Besusu Barat dilaksanakan empat tahap dalam setahun (triwulan). Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan PKH sendiri ada delapan tahap, yang pertama pembukaan rekening kolektif untuk KPM PKH, kedua sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial, ketiga distribusi KKS dan Himbara dan BSI berkoordinasi dengan Dinsos Kab/Kota, keempat penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D), kelima penerbitan surat perintah pemindahbukuan dari RPL ke rekening KPM, keenam pencairan dan pemanfaatan dana bantuan sosial PKH, ketujuh rekonsiliasi penyaluran bantuan PKH setiap tahap, kedelapan pemantauan,

monotoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH non tunai.

Melihat keterangan dari ketiga informasi diatas kita dapat melihat bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak efektif meskipun sudah terencana dengan matang tentang kegiatan ini akan tetapu terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat ketika ingin dilaksanakan seperti keterlambatan dana dalam pencairan yang terkadang terlambat beberapa hari bahkan memakan waktu sampai 2 minggu dari Kementrian Sosial sendiri sebagai pelaksana program terhadap Dinas Sosial Kota Palu, dari proses penyalurannya data masyarakat miskin banyak yang belum valid hal ini yang menyebabkan keterlambatan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran atau tujuan suatu program.

2) Sasaran

Dalam sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang tergolong kurang mampu.

Program pemberdayaan seperti program keluarga harapan seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya suatu program tidak mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut tidak efektif. Dalam program bantuan yang diberikan tentunya ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan guna memberikan bantuan tersebut pada masyarakat, karena semuanya sudah tertuang dalam peraturan yang ada serta buku/pedoman bantuan tersebut. Karena menjaga kemungkinan adanya kecurangan dalam proses penyalurannya serta juga menghindari adanya keterkaitan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan dalam program ini, adapun kriteria penerima manfaat Program Keluarga Harapan yaitu:

a. Komponen Kesehatan, yaitu terdiri dari kategori ibu hamil maksimal dua kali kehamilan dan anak usia dini dengan usia 0 sampai dengan 6 tahun maksimal dua anak.
b. Komponen pendidikan, yaitu terdiri dari kategori anak SD/MI sederajat, anak SMP/MTS sederajat dan anak SMA/MA sederajat yaitu anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
c. Komponen Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri dari kategori lanjut usia 70 tahun keatas maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga, penyandang disabilitas berat maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas mengenai target sasaran pada program pkh ini, peneliti bisa mengatakan bahwa belum tepat pada sasarannya. Hal ini dapat dilihat ketika peneliti mewawancarai informan penerima bantuan tersebut dilapangan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Hal tersebut terlihat jelas ketika apa yang di utarakan Sekretaris Kelurahan Besusu Barat sebelumnya sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh pendamping PKH dan juga beberapa penerima manfaat PKH. Sekretaris Kelurahan Besusu Barat mengatakan bahwa pendataan penerima manfaat PKH sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh kementrian sosial, sedangkan menurut pendamping PKH masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan akan tetapi tidak mendapatkan

bantuan ini dan banyak masyarakat memberikan keluhan kepada mereka mengapa mereka tidak menerima bantuan PKH padahal mereka layak untuk bantuan tersebut akan tetapi pendamping PKH tidak mempunyai hak untuk menambahkan peserta penerima manfaat PKIH hanya pemerintah yang memiliki kewenangan memasukan masyarakat kurang mampu ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut beberapa penerima manfaat PKH mereka tidak menerima info terbuka tentang adanya bantuan ini tetapi mereka hanya mengetahui bantuan ini dari pihak lain dan juga ada yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan tersebut akan tetapi tetap menerima seperti anak yang tidak sekolah tetapi tetap menerima bantuan, kemudian beberapa penerima yang sudah masuk kategori mampu masih tetap menerima bantuan dikarenakan belum ada niatan untuk keluar. Hal ini menunjukkan dalam pemilihan penerima atau sasaran PKH ini tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam pelaksanaan bantuan tersebut ada pihak lain yang ikut campur dalam menentukan sasaran padahal harusnya bantuan ini di peruntukkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, agar cita cita dari program ini yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan bisa tercapai sebagaimana mestinya.

b. Integrasi

Integrasi yaitu suatu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Jadi maksud dari integrasi dalam penelitian ini adalah bagaimana kita mengukur efektivitas dari pelaksanan program keluarga harapan di Kelurahan Besusu Barat, dalam hal ini pemerintah dan pendamping PKH sebagai pelaksana bantuan tersebut bagaimana mereka melakukan sosialisasi guna menyalurkan bantuan tersebut, dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat kemampuan aparatur untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Besusu Barat sebagai usaha untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat diukur atau dilihat dari bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping PKH kepada masyarakat dan seberapa jauh masyarakat yang ditargetkan dapat mengetahui informasi yang di dapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami dan mengerti atau bahkan sebaliknya. Dimana untuk melakukan proses sosialisasi mengenai program, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana program, agar apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian informasi tentang program juga harus dilakukan antara pelaksana program kebijakan dengan masyarakat. Proses penyampaian informasi atau sosialisasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana program ini menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, sehingga pelaksana tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan program yang ingin dilaksanakan.

Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari prograns tersebut. Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program ini serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Setelah peneliti melakukan penelusuran wawancara ditemukan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping PKH sendiri sudah berjalan akan tetapi belum efektif.

Melihat hasil wawancara ketiga informan masyarakat diatas peneliti merasa bahwa perlu adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping PKH sebagaimana pelaksanaan bantuan tersebut, agar berbagai informasi mengenai Program Keluarga Harapan ini bisa sampai ke masyarakat secara menyeluruh serta perlu adanya sinergitas atau kerjasama antar dinas sosial dan pendamping PKH agar bisa sama-sama mengawal proses peaksanaan sosiaisasi

bantuan Program Kleuarga Harapan. Selain itu belum adanya pemahaman yang memadai tentang bagaimana konsep PKH yang diberikan oleh Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial kepada masyarakat, maka perlu adanya sostalisasi yang baik kepada seluruh target yang ingin dituju sehingga mereka mengetahui keberadan serta ajuan dari adanya bantuan tersebut. Dengan menggunakan proses sosialisasi yang baik dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individiu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengistan tenaga kerja. Di dalam adaptasi tenaga dari pendamping PKH sendiri sebagai pelaksana dari program ini sangat diperlukan dalam rangka menyelenggarakan serta menjalankan kebijakan atau regulasi yang dibuat untuk menangani permasalahan yang terjadi. Pendamping PKH sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan di lapangan. Kedudukan pendamping PKH sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat maka pendamping dituntut untuk menjembatani berbagai kepentingan baik itu kepentingan yang datang dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan sebuah program diperlukannya sumber daya manusia yang terampil guna memperlancar proses kegiatan khususnya bantuan PKH di Kelurahan Besusu Barat. Jika dalam prosesnya kekurangan sumber daya manusia yang handal, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif.

Proses adaptasi ini menentukan dalam pencapaian pelaksanan program bantuan PKH di Kelurahan Besusu Barat, untuk itu perlu kita melihat bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping PKH sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan PKH tersebut sampai kepada masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan sebuah program. Maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan, serta keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan, baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam sebuah organisasi. Selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimana sumber daya manusia pada program bantuan PKH ini, maka peneliti sendiri mencoba melakukan wawancara dengan Sekretaris lurah dan pendamping PKH, yang dianggap paham terkait efektivitas program keluarga harapan.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara peneliti diatas mengenai proses adaptasi yang dikemukakan oleh Richard M.Steers peneliti merasa belum efektif, hal ini dapat kita lihat dari kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana PKH yaitu pendamping PKH dan pemerintah sendiri tidak dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dikarenakan masih ada masyarakat kurang mampu (miskin) yang layak untuk menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak masuk menjadi penerima bantuan, dan juga pendamping PKH sebagai pelaksana program bantuan ini juga belum dapat melaksanakan sosialisasi dengan rutin. Meskipun kualitas sumber daya manusia pelaksana dari bantuan program keluarga harapan, jika dilihat dari pemahaman, pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki pelaksana sudah sangat memadai.

Dari tiga aspek diatas diketahui bahwa bantuan PKH ini belum berjalan secara efektif dikarenakan pada aspek pencapaian tujuan dalam pemilihan penerima atau sasaran PKH ini tidak sesuai dengan kriteria yang ada dalam pelaksanaan bantuan tersebut ada pihak lain yang ikut campur dalam menentukan sasaran padahal harusnya bantuan ini diperuntukkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, pada aspek integrasi bahwa perlu adanya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah dan pendamping PKH sebagai pelaksana bantuan tersebut, agar berbagai informasi mengenai program keluarga harapan ini bisa sampai ke masyarakat secara menyeluruh serta perlu adanya sinergitas atau kerjasama antara dinas sosial dengan pemerintah serta pendamping PKH agar bisa sama sama mengawal proses pelaksanaan sosialisasi bantuan program keluarga harapan, dan pada aspek adaptasi kemampuan yang

dimiliki oleh pelaksana PKH ini yaitu pendamping PKH dan pemerintah sendiri tidak dapat melaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dikarenakan masih ada masyarakat kurang mampu/miskin yang layak untuk menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak masuk menjadi penerima bantuan.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkas bahwa kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu belum berjalan secara efektif dan maksimal, karena dari semua aspek yang digunakan dalam penelitian ini Menurut Richard M.Steers (1985:53) tidak berjalan secara efektif disetiap aspek masih terdapat kendala dalam pengimplementasian program tersebut.

BIBLIOGRAFI

Indonesia, Kementerian Sosial Republik. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/187

Indonesia, Pemerintah Republik. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Diambil dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36404/uu-no-40-tahun-2004

Indonesia, Republik. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. □. *Jakarta, RI*.

Indonesia, Republik. (2010). Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jakarta: Legalitas*.

Indonesia, Republik. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor*, *23*.

Kementerian Sosial RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH), Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Jakarta.

Pratiwi, D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur). *(Doctoral dissertation, IAIN Metro*.

Satori., Aan Komariah dan Djam'an. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: alfabeta.

Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

TNP2K. (2022). *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, "Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019*.

Copyright holder:
Samkamaria, Maria Lea Frensy Bakarbessy (2025)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)